

ABSTRAK

Dimulainya era otonomi daerah sejak tahun 2001 membawa konsekuensi terhadap penyediaan sumber daya keuangan daerah yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan publik di daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerahnya. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih kreatif agar mampu menggali sumber yang potensial terhadap keuangan daerah dengan tidak mengurangi harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat.

Kabupaten Pasuruan sebagai daerah otonom dan merupakan obyek pada penelitian ini memiliki potensi ekonomi yang sangat menentukan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi. Besarnya kemampuan keuangan tersebut dapat diketahui melalui indikator derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari sisi penerimaan daerah sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dari sisi pengeluaran daerah. Berdasarkan kedua indikator tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kepekaan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga perlu diukur melalui elastisitas PAD.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pasuruan selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 rata-ratanya sebesar 8,31%. Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah sangat kecil. Sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 rata-ratanya sebesar 18,66%. Peranan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah sangat kecil. Adapun koefisien elastisitas PAD selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 terhadap PDRB harga berlaku rata-ratanya sebesar 3,4 sedangkan terhadap PDRB harga konstan rata-ratanya sebesar 10,48. Oleh karena koefisien elastisitas PAD lebih besar dari satu ($e > 1$) maka dapat dikatakan elastis yang berarti peningkatan perubahan PDRB mampu meningkatkan perubahan PAD. Dengan demikian disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.